

PENGARUH PENDIDIKAN, PDRB DAN TIPE PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN

Wildan AryaPutra R¹; Ni Made Sukartini²

Universitas Airlangga, Surabaya^{1,2}

Email : wildan.aryaputra.rosdiyanto-2022@feb.unair.ac.id¹

ABSTRAK

Kemiskinan di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Timur, terus mengalami penurunan secara bertahap. Namun, ketimpangan kemiskinan antar wilayah, terutama antara perkotaan dan pedesaan, masih menjadi masalah serius. Perbedaan akses terhadap pendidikan, layanan publik, dan peluang ekonomi berkontribusi pada ketimpangan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh pendidikan, PDRB, dan tipe pemerintahan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, yang mencakup 29 kabupaten dan 9 kota pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Di sisi lain, variabel PDRB dan tipe pemerintahan menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun PDRB meningkat, distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi masih belum merata, sehingga kelompok masyarakat miskin tidak sepenuhnya merasakan dampaknya. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang belum optimal dalam merancang dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan juga berkontribusi pada ketimpangan yang ada.

Kata Kunci : Kemiskinan; Pendidikan; Produk Domestik Regional Bruto; Tipe Pemerintah

ABSTRACT

Poverty in Indonesia, including in East Java Province, continues to decline gradually. However, poverty inequality between regions, especially between urban and rural areas, remains a serious problem. Differences in access to education, public services, and economic opportunities contribute to this inequality. The purpose of this study is to examine the effect of education, GRDP, and type of government on poverty in East Java Province. This study uses secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of East Java Province, which covers 29 districts and 9 cities in 2022. The results of the study show that education has a negative and significant impact on poverty. On the other hand, the GRDP and type of government variables show a positive and significant impact on poverty. These results indicate that although GRDP has increased, the distribution of the benefits of economic growth is still uneven, so that poor groups do not fully feel the impact. In addition, suboptimal governance in designing and implementing poverty alleviation programs also contributes to the existing inequality.

Keywords : Poverty; Education; Gross Regional Domestic Product; Type of Government

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan politik, serta menjadi tantangan besar bagi pembangunan di banyak negara, termasuk Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan di Indonesia telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, ketimpangan antarkelompok sosial dan wilayah terus menjadi masalah utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan ekonomi yang komprehensif dan multidimensi. (Sugiasuti & Pratama, 2022).

Salah satu faktor penting dalam pengurangan kemiskinan adalah pendidikan. Untuk meningkatkan mobilitas sosial ekonomi dan meningkatkan sumber daya manusia, pendidikan sangat penting dan harus diperhatikan. Melalui pendidikan, individu memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan keluar dari lingkaran kemiskinan (Pratama, 2023). Namun, di banyak daerah di Indonesia, akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih menjadi tantangan, terutama di wilayah terpencil dan miskin. Ketimpangan akses ini memperburuk situasi kemiskinan, menciptakan lingkaran setan yang sulit dipecahkan. Di Indonesia, variasi dalam kualitas pemerintahan antara daerah yang berbeda memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat keberhasilan pengentasan kemiskinan. Daerah dengan pemerintahan yang efektif dan inovatif cenderung lebih mampu memanfaatkan potensi ekonomi dan sumber daya manusia untuk mengurangi kemiskinan dibandingkan daerah dengan pemerintahan yang lemah atau korup. Kualitas pengembangan sumber daya manusia yang unggul memainkan peran krusial dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengadopsi dan memanfaatkan berbagai faktor pendorong kemajuan ekonomi. Hal ini mencakup kemampuan dalam menguasai aspek teknologi serta memahami struktur kelembagaan, yang keduanya merupakan komponen vital dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Dewi & Sutrisna, 2012)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan kemampuan ekonomi masyarakatnya. PDRB yang lebih tinggi biasanya menunjukkan potensi ekonomi yang lebih besar, yang diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, peningkatan

PDRB belum tentu efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan jika tidak disertai dengan kebijakan distribusi yang adil. Di beberapa daerah, pertumbuhan ekonomi justru menciptakan ketimpangan baru yang membuat kelompok miskin semakin tertinggal. Tujuan dari memperkenalkan konsep tersebut adalah sebagai indikator dalam mengukur kualitas modal manusia (Dewi & Sutrisna, 2012). Terdapat tiga aspek utama pembangunan manusia yang terkandung dalam IPM yaitu aspek kesehatan indikator pengukuran dari angka harapan hidup, aspek pendidikan yang dinilai dari tingkat literasi dan rata-rata lama sekolah, serta aspek ekonomi yang mencerminkan standar kelayakan hidup seorang dan tolak ukur yang dipakai dari paritas daya beli (UNDP, 2004; Dewi & Sutrisna, 2012).

Faktor ketiga yang tidak kalah penting adalah tipe pemerintah. Pemerintah sebagai aktor utama dalam pengambilan kebijakan memiliki peran besar dalam menentukan arah pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah yang inklusif, transparan, dan demokratis cenderung lebih berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan yang pro-rakyat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, redistribusi pendapatan, dan penyediaan layanan sosial. Sebaliknya, pemerintah yang tidak efektif atau memiliki bias terhadap kelompok tertentu dapat memperburuk kemiskinan dengan menciptakan kebijakan yang tidak merata atau tidak tepat sasaran (Warsono et al., 2019). Selain itu, tipe pemerintahan yang diterapkan juga berpengaruh pada efektivitas kebijakan ekonomi. Dalam beberapa situasi, kebijakan yang tidak memperhatikan kebutuhan daerah miskin atau tidak mendukung industri yang banyak menyerap tenaga kerja, seperti pertanian dan usaha kecil, dapat memperburuk kemiskinan. Akibatnya, penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana PDRB per kapita, jenis pemerintahan, dan tingkat kemiskinan di suatu wilayah berhubungan satu sama lain. Selain itu, juga penting untuk mempelajari bagaimana kebijakan yang lebih inklusif dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Tandiboyong & Prasasyaningsih, 2024).

Studi ini menyelidiki pengaruh PDRB per kapita dan tipe pemerintahan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Diharapkan bahwa solusi kebijakan yang lebih sesuai dapat dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di wilayah ini. Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan ekonomi

yang berbasis pada pemerataan dan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dapat memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan, meskipun suatu daerah mengalami peningkatan PDRB per kapita yang signifikan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan Teori

Kemiskinan

Ketiadaan sumber daya finansial dan kebutuhan mendasar untuk mencapai taraf hidup minimal disebut kemiskinan, yang dapat dialami oleh individu maupun kelompok masyarakat. Kondisi ini ditandai dengan pemasukan yang sangat rendah, yang bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pangan, air bersih, sanitasi yang baik, layanan kesehatan, tempat tinggal, akses ke pendidikan, dan informasi adalah beberapa dari kebutuhan ini (Asadullah, Mansor, & Savoia, 2021). Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensi. Untuk mengukurnya secara lebih komprehensif, diperlukan pendekatan yang tidak hanya melihat aspek pendapatan atau pengeluaran, tetapi juga dimensi-dimensi lain yang mencerminkan standar hidup yang layak. Villar (2023) dalam jurnalnya mengusulkan pengukuran kemiskinan berbasis kesejahteraan (*welfare poverty measurement*) yang mempertimbangkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan material.

Nufus & Yazid (2023) mengidentifikasi dua jenis kemiskinan yang berbeda: kemiskinan struktural dan kemiskinan budaya. Kemiskinan struktural terjadi akibat pengelolaan sumber daya yang tidak efektif dan terbatasnya akses terhadap sumber daya tersebut. Sementara itu, kemiskinan budaya berkaitan dengan sikap mudah menyerah dan kurangnya upaya dalam menghadapi kesulitan. Sementara itu, penelitian Salsabila *et al.*, (2022) Metode geometri menunjukkan bahwa populasi Indonesia terus meningkat. Fenomena ini selaras dengan pemikirab Malthus, yang mengungkapkan bahwa peningkatan populasi yang cepat bisa menjadi penyebab utama timbulnya kemiskinan di suatu daerah. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk dianggap sebagai kontributor terbesar terhadap meningkatnya angka kemiskinan.

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor fundamental dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tingkat pendidikan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan

pendapatan. Pendidikan juga dianggap sebagai instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi (*intergenerational poverty*). Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga membentuk keterampilan, yang membuatnya sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Melalui pendidikan, masyarakat dapat mengakses peluang ekonomi yang lebih baik, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan. Todaro dan Smith (2009) juga menekankan bahwa peningkatan akses pendidikan adalah strategi penting dalam pemberantasan kemiskinan. Mereka mengatakan bahwa tingkat melek huruf dan lama sekolah rata-rata berkontribusi secara signifikan terhadap perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Dengan pendidikan yang baik, orang dapat memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja.

Menurut Todaro dan Smith (2015), Dengan investasi dalam modal manusia, atau modal manusia, pendidikan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan. Pendidikan yang lebih baik membantu orang memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih menguntungkan, yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga mereka. Pendidikan juga memiliki efek tidak langsung terhadap pengentasan kemiskinan. Contohnya, pendidikan yang lebih baik sering kali dikaitkan dengan penurunan angka fertilitas, peningkatan kesadaran kesehatan, dan penguatan partisipasi politik (Irwan et al., 2021). Semua faktor ini berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan secara keseluruhan.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), yang didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai total nilai tambah bruto dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi dalam batas wilayah tertentu selama periode waktu tertentu, adalah alat penting untuk mengukur kinerja ekonomi sebuah wilayah. PDRB mencerminkan aktivitas ekonomi regional dan menjadi dasar untuk memahami tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Penelitian oleh (Ishak et al., 2020) menunjukkan bahwa peningkatan PDRB memiliki efek yang sangat negatif terhadap kemiskinan, yang menunjukkan bahwa peningkatan PDRB memiliki kecenderungan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah yang diteliti. PDRB merupakan ukuran kapasitas ekonomi wilayah dalam menciptakan kesejahteraan. Wilayah yang

memiliki PDRB tinggi cenderung memiliki infrastruktur yang lebih baik, lebih banyak peluang kerja, dan akses yang lebih besar ke layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan PDRB sering diasosiasikan dengan pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Dalam teori pertumbuhan ekonomi, seperti yang dijelaskan oleh Adam Smith dan David Ricardo, pertumbuhan output ekonomi yang tercermin dalam PDRB adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan PDRB sering kali dikaitkan dengan penurunan kemiskinan. Lapangan kerja muncul, pendapatan rumah tangga meningkat, dan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar meningkat sebagai hasil dari peningkatan PDRB. Namun, dampaknya terhadap kemiskinan bergantung pada distribusi pendapatan yang dihasilkan dari PDRB.

Sebaliknya, (Takaredas et al., 2023) menemukan bahwa dalam beberapa kasus, pertumbuhan PDRB justru memiliki hubungan positif signifikan dengan kemiskinan, yang dapat disebabkan oleh distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata atau ketimpangan pendapatan yang meningkat. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan redistribusi yang efektif, pertumbuhan PDRB akan membantu mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan PDRB bersifat inklusif dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Jenis Pemerintah (Urbanisasi)

Perpindahan desa ke kota dari daerah pedesaan yang miskin ke daerah perkotaan yang kaya telah menjadi bentuk migrasi yang dominan. Tren migrasi desa-kota di Indonesia dapat dijelaskan oleh sejumlah faktor pendorong dan penarik (Wajdi, Mulder, & Adioetomo, 2017). Meskipun permintaan tenaga kerja di pusat-pusat kota merupakan faktor penarik utama bagi orang-orang untuk pindah dari desa ke kota, Susanti & Damayanti (2015), dan Sukamdi & Mujahid (2015) merangkum faktor pendorong utama migrasi internal di Indonesia adalah berkurangnya ketersediaan lapangan kerja di sektor pertanian, masalah pekerjaan, keinginan untuk bergabung dengan keluarga, pernikahan, mencari peluang ekonomi yang lebih baik, dan akses terhadap pendidikan (Yusuf & Freytag-Leyer, 2020).

Perpindahan penduduk ke wilayah perkotaan memiliki kaitan erat dengan kebijakan pembangunan yang cenderung prioritas ke kota (Mukbar, 2009; Hidayat, 2020). Perkembangan di kota-kota besar, yang berperan sebagai titik sentral aktivitas ekonomi, telah memikat warga desa untuk berpindah ke kota guna memanfaatkan peluang kerja yang lebih banyak tersedia. Hal ini semakin diperparah oleh terbatasnya lapangan pekerjaan di desa, baik dari segi jumlah maupun keragamannya. Fenomena urbanisasi ini sejalan dengan teori migrasi penduduk yang dikemukakan oleh Ravenstein (1885) dan Todaro (1976). Mereka berpendapat bahwa migrasi penduduk dipicu oleh kesenjangan pendapatan antara wilayah asal dan destinasi. Masyarakat pedesaan ingin hidup lebih baik di kota karena perbedaan penghasilan yang mencolok antara kota dan pedesaan. (Hidayati, 2021).

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan representasi yang terkonstruksi berdasarkan kajian dan konsep ekonomi, yang selanjutnya menggambarkan alur pemikiran dalam proses penelitian untuk memetakan tujuan dan fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana realisasi PDRB, pendidikan, dan tipe pemerintah berdampak pada kemiskinan pada tahun 2022.

Pengembangan Hipotesis

Beberapa hipotesis dapat disimpulkan berdasarkan teori dan studi empiris yang berkaitan dengan jurnal bidang ini, seperti:

H1: Pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan peluang kerja, dan menurunkan tingkat kemiskinan. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih besar ke pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi, yang membantu mengurangi kemiskinan.

H2: Pendapatan PDRB per kapita memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Peningkatan PDRB per kapita menunjukkan pertumbuhan ekonomi, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan. PDRB yang lebih tinggi biasanya menunjukkan daya beli yang lebih besar, yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan.

H3: Tipe pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Pemerintah yang efektif lebih mampu mengalokasikan anggaran untuk program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan.

H4: Tingkat kemiskinan dipengaruhi secara signifikan oleh PDRB, pendidikan, dan jenis pemerintah.

Ketiga variabel tersebut berinteraksi secara sinergis dalam menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang mendukung pengurangan kemiskinan. Pendidikan meningkatkan modal manusia, PDRB memperluas peluang ekonomi, dan tipe pemerintah yang baik memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil. Pendidikan berpengaruh positif terhadap PDRB per kapita.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara proses penelitian bekerja, baik dalam mencari data maupun mengungkap fenomena. (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Kajian ilmiah yang berkualitas ditandai oleh pelaksanaannya yang selaras dengan rancangan studi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, seluruh tahapan penelitian dapat berlangsung secara terstruktur dan efisien. Kesesuaian antara implementasi dan perencanaan ini menjamin bahwa proses pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode yang tepat dan terarah, sehingga menghasilkan temuan yang valid dan bermanfaat dalam konteks bidang ilmu yang diteliti. Peneliti menggunakan metode statistik deskriptif sebagai pengantar untuk melihat karakteristik data. Selanjutnya, data akan diolah dengan analisis *Ordinary least square* (OLS).

Data cross-section yang dikumpulkan dari data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data ini dikumpulkan pada tahun 2022 dan mencakup 29 kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa Timur. Pengolahan analisis data menggunakan Microsoft Excel dan aplikasi stata 17.

Penelitian ini menggunakan kemiskinan sebagai *dependent variable* (Y), sedangkan *independent variable* yang digunakan PDRB (X1), Pendidikan (X2), dan dummy (X3). Indikator kemiskinan digunakan untuk mengetahui seberapa miskin suatu wilayah atau kelompok masyarakat. Beberapa indikator yang umum digunakan dalam penelitian mengenai kemiskinan, termasuk studi tentang hubungan pendidikan, PDRB, dan tipe pemerintahan terhadap kemiskinan yang direpresentasikan melalui pencapaian

dalam aspek-aspek fundamental kualitas hidup masyarakat. Sebagai parameter kesejahteraan, indikator ini didasarkan pada tiga aspek utama: harapan hidup dan kesehatan, tingkat edukasi, serta standar kehidupan yang memadai. Skala merupakan satuan yang dipakai dan data diambil dari BPS. Pendapatan daerah mencerminkan total pemasukan yang berhasil dihimpun oleh otoritas setempat dalam rentang waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam satuan milyar rupiah, bersumber dari DJPK.

Selanjutnya, kemiskinan diproxy dari jumlah penduduk yang dianggap miskin jika ketiadaan sumber daya finansial dan kebutuhan mendasar untuk mencapai taraf hidup minimal yang dapat dialami oleh individu maupun kelompok masyarakat. Kondisi ini ditandai dengan pemasukan yang sangat rendah, yang bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan-kebutuhan tersebut mencakup pangan, air bersih, sanitasi yang layak, pelayanan kesehatan, tempat bernaung, akses pendidikan, serta informasi. Satuan dalam bentuk ribu jiwa dan sumber data yang diambil dari BPS. Setelah itu, variabel dummy merupakan indikator jenis pemerintahan kota dan desa. Dimana, desa diberi nilai 1 sedangkan kota bernilai 0.

Setelah indikator masing-masing variabel telah ditentukan, maka tahap selanjutnya membuat model yang sesuai dengan teknik analisis yang dipakai. Analisis Ordinary Least Square (OLS) digunakan dengan data cross-section berikut untuk mengetahui hubungan antara independent variable dan dependent variable (Gujarati, & Porter, 2013):

$$\ln \text{Kemiskinan}_i = \alpha + \beta_1 \ln \text{Pendidikan}_i + \beta_2 \ln \text{PDRB}_i + \beta_3 \text{TipePemerintahan}_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

Ln Kemiskinan kemiskinan	= Logaritma natural dari jumlah Orang dibawah garis kemiskinan
Ln Pendidikan	= Logaritma natural dari Rata-Rata Lama Sekolah
LnPDRB	= Logaritma natural dari Produk Domestik Regional Bruto
TipePemerintahan	= Dummy bernilai 1 untuk wilayah kabupaten, 0 untuk lainnya
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi
i	= Data <i>cross section</i> Kabupaten atau Kota
e	= <i>error term</i>

Langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan dua cara alat uji yaitu uji T dan uji F. Menurut Gujarati (2011) fungsi dari uji

statistik hipotesis sebagai melihat tingkat signifikansi setiap *independent variable* terhadap *dependent variable* pada model yang telah dibuat. Uji F berfungsi sebagai mengetahui apakah *dependent variable* (Y) dipengaruhi oleh *independent variable* (X). Cara pengujian berdasarkan uji F varians-nya dengan membandingkan $hit (h)$ dengan $a()$ pada $= 0,05$. Ketika $hit > a$, maka tolak o , yang berarti *independent variable* secara keseluruhan berhasil dijelaskan oleh variasi dari model regresi, seberapa besar dampaknya pada *dependent variable* dan sebaliknya $hit < a$, maka gagal tolak o , yang berarti *independent variable* secara keseluruhan tidak berhasil dijelaskan oleh variasi dari model regresi, seberapa besar dampaknya pada *dependent variable*.

Setelah dilakukan uji F langkah berikutnya adalah uji T. Uji T ini berfungsi sebagai pengujian secara parsial. Proses analisis dalam merumuskan hipotesis pada uji T dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai hit dengan a pada tingkat alpha ($= 0,05$). Jika $hit \geq a$ maka tolak o , yang berarti *dependent variable* dapat diterangkan oleh variasi *independent variable* dan adanya pengaruh pada kedua variabel tersebut, sebaliknya jika $hit < a$ maka gagal tolak o , yang berarti *dependent variable* tidak dapat diterangkan oleh variasi *independent variable* dan Kedua variabel tidak memiliki korelasi yang signifikan.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Analisis Deskriptif Kuantitatif

Berdasarkan Tabel 1 yang tersedia, analisis deskriptif tersebut dapat mempertimbangkan untuk membuat model OLS dengan menggunakan Kemiskinan sebagai *dependent variable*, sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kinerja perekonomian daerah, tingkat pendidikan diukur dari lama rata-rata sekolah, dan variabel dummy sebagai *independent variable*. Dataset ini mencakup 38 observasi, yang memberikan ukuran sampel yang cukup untuk analisis OLS. Variabel Kemiskinan memiliki rata-rata 110.03 dengan standar deviasi 67.84, menunjukkan variasi moderat dalam pembangunan manusia di seluruh daerah yang diamati. RLS menunjukkan variabilitas yang sangat tinggi dengan rata-rata 8.27 dan standar deviasi 1.62, yang mengindikasikan perbedaan besar dalam pendapatan atau alokasi pembangunan antar daerah. PDRB juga bervariasi secara signifikan, dengan rata-rata 66231.32 dan standar deviasi 85836.81, mencerminkan ketimpangan dalam tingkat kemiskinan. Variabel tipe pemerintahan dalam bentuk dummy, dengan rata-rata

0.76, menunjukkan bahwa sekitar 0.43 dari observasi memiliki karakteristik tertentu yang diwakili oleh kabupaten.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi *Jarque-Bera* atau sering dikenal sebagai uji asumsi klasik dilakukan sebelum uji regresi. Hasil uji *Jarque-Bera* menunjukkan tingkat probabilitas senilai 0.0729 yang menandakan di atas tingkat alpha (0,05) sehingga tolak H_0 yang berarti data penelitian disimpulkan terdistribusi secara normal. Pada uji multikolinearitas, hasil estimasi menunjukkan data penelitian telah terbebas dari multikolinearitas dibuktikan dari nilai VIF pada variabel independen Pendidikan, Tipe pemerintahan, dan PDRB secara berturut-turut sebesar 2.29; 2.01; 1.72. Hal tersebut dapat dikatakan $VIF < 10$ sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Model White digunakan sebagai alat untuk menguji *heteroscedasticity*. Berdasarkan hasil estimasi tingkat probabilitas *Chi-Square* senilai 0.1667 yang berarti lebih dari tingkat signifikan 0,05, maka hasil tersebut menunjukkan tidak terjadi *heteroscedasticity*.

Analisis Regresi

Dilihat dari tabel 3, didapatkan persamaan model regresi yakni:

$$\text{Kemiskinan} = 0.992 + (-1.811)\text{LnPendidikan} + 0.532\text{LnPDRB} + 1.871\text{TipePemerintahan} + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi yang disebutkan, dapat dijelaskan bahwa:

1. Apabila suku bunga acuan, inflasi, jumlah uang beredar, dan kurs dianggap tetap atau tidak berubah, nilai konstanta indeks harga saham sektor keuangan adalah -0,643786.
2. Koefisien regresi variabel pendidikan adalah -1,811, yang berarti bahwa dengan asumsi PDRB dan tipe pemerintahan tetap, kemiskinan akan turun 1,811% jika pendidikan naik 1%.
3. Nilai koefisien regresi variabel PDRB adalah 0.532, yang berarti bahwa jika PDRB meningkat 1%, tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0.532 rupiah. Selama sistem pendidikan dan pemerintahan dianggap tidak berubah.
4. Koefisien regresi variabel tipe pemerintahan adalah 1,871, yang berarti bahwa kemiskinan meningkat 1,871 persen saat tipe pemerintahan meningkat 1%. Selama PDRB dan pendidikan dianggap tetap.

Uji Parsial (Uji t), Uji Simultan (Uji F), dan Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 3 menunjukkan uji t bahwa semua variabel—PDRB, tipe pemerintahan, dan pendidikan—berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada tingkat signifikansi di bawah 1%.

Nilai probabilitas F-statistik adalah 0.000, karena nilai probabilitas $0.000 < 0,05$. Oleh karena itu, kesimpulan dibuat bahwa model regresi adalah alat yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang diestimasi. Model ini juga dapat menjelaskan bagaimana pendidikan, PDRB, dan jenis pemerintahan yang berbeda dapat mempengaruhi kemiskinan secara bersamaan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2), yang dapat dilihat dari tabel 3, menunjukkan nilai Adjusted R-Squared 0,797. Ini menjelaskan proporsi pengaruh variabel pendidikan, PDRB, dan tipe pemerintahan mampu mempengaruhi kemiskinan sebesar 79.7%. Namun, variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini mempengaruhi lebih banyak, yaitu 20.3%.

Diskusi

Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Hasil regresi menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih baik dapat mengurangi kemiskinan. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan modal manusia di Provinsi Jawa Timur, yang secara langsung berdampak pada pengurangan kemiskinan. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Di Jawa Timur, sektor-sektor utama seperti manufaktur, agribisnis, dan pariwisata sangat membutuhkan tenaga kerja terampil yang dapat dihasilkan melalui pendidikan formal maupun pelatihan vokasi. Produksi masyarakat meningkat ketika orang memiliki keterampilan yang lebih baik, yang menghasilkan peningkatan pendapatan dan kualitas hidup. Selain itu, pendidikan juga membuka akses bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pekerjaan formal dengan pendapatan yang stabil, dibandingkan dengan pekerjaan informal yang lebih rentan terhadap risiko kemiskinan.

Selain meningkatkan modal manusia, pendidikan juga memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat Jawa Timur. Orang yang berpendidikan dapat beralih dari industri konvensional, seperti pertanian, ke industri dan jasa yang lebih produktif, yang menawarkan peluang pendapatan yang lebih besar. Sebaliknya, kewirausahaan dan inovasi didorong oleh pendidikan, yang merupakan komponen penting dalam

pembentukan UKM. Contohnya, pendidikan berbasis kearifan lokal dapat mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah, seperti agrowisata di Malang atau pengolahan hasil laut di daerah pesisir. Dengan diversifikasi ekonomi ini, masyarakat tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi sebelumnya, meningkatnya PDRB dapat meningkatkan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Meningkatnya PDRB per kapita tidak selalu menjamin pengurangan kemiskinan dan, dalam beberapa kasus, bahkan dapat memperburuk kesenjangan dan meningkatkan kemiskinan, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Fenomena ini dapat terjadi karena distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Jika pertumbuhan PDRB terkonsentrasi pada sektor tertentu atau di wilayah tertentu, seperti kota-kota besar (Surabaya atau Malang), maka daerah pedesaan atau wilayah yang kurang berkembang seperti Madura mungkin tidak merasakan dampak positifnya. Akibatnya, masyarakat miskin di wilayah tertinggal tetap terjebak dalam kemiskinan karena mereka tidak memiliki akses ke peluang yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, meningkatnya PDRB per kapita sering kali disertai dengan urbanisasi yang cepat, yang dapat menciptakan tantangan sosial ekonomi baru. Mereka yang berasal dari daerah pedesaan ditarik ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan karena urbanisasi, tetapi banyak dari mereka hanya dapat menemukan pekerjaan informal dengan upah rendah. Hal ini dapat menyebabkan munculnya kantong-kantong kemiskinan baru di daerah perkotaan, seperti kawasan pemukiman kumuh. Ketimpangan ini juga dapat diperparah jika peningkatan PDRB lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi atas, sementara kelompok masyarakat miskin tidak memiliki kapasitas untuk memanfaatkan pertumbuhan tersebut. Dengan demikian, meskipun PDRB per kapita meningkat, ketimpangan ekonomi yang melebar dapat menyebabkan kemiskinan tetap tinggi atau bahkan meningkat di Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh Tipe Pemerintah Terhadap IPM

Karena adanya perbedaan yang signifikan dalam akses terhadap infrastruktur, layanan publik, dan peluang ekonomi, kemiskinan cenderung lebih tinggi di kabupaten dibandingkan di kota pada Provinsi Jawa Timur. Di kabupaten, terutama di daerah

pedesaan, akses terhadap pendidikan, fasilitas kesehatan, dan transportasi sering kali terbatas. Hal ini menghambat masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, peluang kerja di kabupaten umumnya lebih terkonsentrasi pada sektor primer seperti pertanian atau perikanan, yang rentan terhadap fluktuasi harga, kondisi cuaca, dan produktivitas yang rendah. Ketergantungan pada sektor-sektor ini membuat masyarakat lebih rentan terhadap kemiskinan dibandingkan mereka yang tinggal di kota, di mana sektor sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa) lebih dominan dan menawarkan pendapatan yang lebih stabil.

Selain itu, distribusi manfaat pembangunan sering menjadi masalah bagi kabupaten di Jawa Timur. Kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan Sidoarjo, yang memiliki infrastruktur yang lebih baik dan pasar tenaga kerja yang lebih aktif, menjadi fokus investasi dan program pemerintah. Sementara itu, daerah kabupaten, terutama di kawasan Madura atau daerah terpencil seperti Bondowoso, kerap tertinggal dari segi pembangunan ekonomi. Ketimpangan ini memperburuk kesenjangan antara kota dan kabupaten, di mana masyarakat pedesaan tidak hanya memiliki pendapatan yang lebih rendah tetapi juga kurang mampu mengakses layanan dasar yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan.

KESIMPULAN

Menurut hasil penelitian, pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Pendidikan yang lebih baik meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengakses pekerjaan dengan upah layak, meningkatkan keterampilan, dan memutus siklus kemiskinan antar generasi. Dengan meningkatkan rata-rata tingkat pendidikan, masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia. Ini membantu mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah pedesaan dan kabupaten yang tingkat kemiskinannya masih tinggi.

Namun, penelitian juga menemukan bahwa PDRB per kapita dan tipe pemerintahan justru memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, yang menunjukkan adanya distribusi manfaat pembangunan yang tidak merata dan ketimpangan tata kelola pemerintah. Pertumbuhan PDRB mungkin terkonsentrasi di sektor atau wilayah tertentu tanpa memberikan dampak langsung kepada kelompok masyarakat miskin, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, tipe pemerintahan yang ada mungkin kurang efektif dalam

memastikan bahwa program-program pengentasan kemiskinan benar-benar menjangkau kelompok sasaran. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan yang lebih inklusif, pemerataan pembangunan antar wilayah, dan penguatan tata kelola pemerintah diperlukan untuk mengurangi efek negatif dari pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Provinsi Jawa Timur.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Hasil penelitian ini menekankan betapa pentingnya investasi lebih besar dalam sektor pendidikan sebagai cara utama untuk mengakhiri kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Ini akan memiliki dampak kebijakan yang signifikan. Pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan dan akses, terutama di daerah tertinggal, dengan menyediakan program pelatihan berbasis keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Selain itu, untuk mengatasi dampak negatif dari pertumbuhan PDRB dan tipe pemerintahan terhadap kemiskinan, diperlukan kebijakan yang memastikan distribusi manfaat pembangunan lebih merata, seperti alokasi anggaran yang lebih besar untuk program pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan. Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan program sosial, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan agar pembangunan lebih inklusif dan berkeadilan.

KETERBATASAN STUDI

Peneliti mengakui adanya sejumlah keterbatasan dalam studi ini, baik dari segi pemilihan variabel maupun rentang waktu yang dijadikan objek penelitian. Variabel-variabel yang digunakan dalam analisis hanya mencakup sebagian faktor yang berpengaruh, sehingga masih terbuka peluang untuk mengeksplorasi faktor-faktor tambahan yang potensial dalam penelitian mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asadullah, M. N., Mansor, N., & Savoia, A. (2021). Understanding a “Development Miracle”: Poverty Reduction and Human Development in Malaysia Since the 1970s. *Journal of Human Development and Capabilities*, 22(4), 551–576. <https://doi.org/10.1080/19452829.2021.1975664>
- Dewi, N. L. S. & Sutrisna, I. K. (2012). Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3, No. 3, 106–114. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/8161>
- Gujarati, D.N & Porter, D. C. (2013). *Basic Econometrics. Introductory Econometrics: A Practical Approach*.
- Gujarati, D. (2011). *Econometrics By Example*. Houndmills: Macmillan Publishers

- Limited.
- Hidayati, I. (2021). Urbanisasi dan Dampak Sosial di Kota Besar: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 212. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.40517>
- Irwan, L., J. A. R., & Jaya, I. (2021). Peningkatan Kesadaran Politik Pada Generasi Muda di Kabupaten Maros. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin*, 2(2), 78. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jpmh/article/view/18019>
- Ishak, R. A., Zakaria, J., & Arifin, M. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar. *PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 41–53. <https://doi.org/10.33096/paradoks.v3i2.463>
- Nufus, S. H., & Yazid, M. (2023). Analysis Of Islamic Financial Institutions OnPoverty In Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 14(2),13–18.
- Mukbar, D. (2009). Kebijakan Terkait Migrasi dan Pola Migrasi. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/553/kebijakan-terkait-migrasi-dan-polamigrasi>
- Pratama, I. N. (2023). Dinamika Kemiskinan di Kota Mataram: Analisis Perubahan Tingkat Kemiskinan Dalam Dekade Terakhir. *Seminar Nasional LPPM UMMAT*, 2(April), 1216–1222.
- Salsabila, S., Sri Agustin, A., Kirana Wijayanti, S., & Kustiawati, D. (2022). Analisis Penerapan Deret Ukur dalam Perhitungan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(8), 1297–1304. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i8.484>
- Sugiasuti, R. H., & Pratama, M. R. (2022). Dampak Buruk Pembangunan Tanpa Pemerataan: Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 16(1), 79–90. <https://profit.ub.ac.id>
- Sukamdi, & Mujahid, G. (2015). Internal Migration in Indonesia. UNFPA Indonesia Monograph Series No.3, xii, 90. Retrieved from http://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/FA_Isi_BUKU_Monograph_Internal_Migration_ENG.pdf
- Susanti, Hera & Damayanti, A. (2015). Internal Migration in Indonesia: Duration and Factors. Depok.
- Takaredas, R., Baruwadi, M. H., & Akib, F. H. Y. (2023). *HUBUNGAN ANTARA KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN PADA PDRB DENGAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO*. 1(1), 1–9.
- Tandiboyong, A. T., & Prasasyaningsih, X. I. (2024). Dampak Penerimaan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Along. *Prosiding Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia*, 2, 1502–1513.
- Todaro, Michael P., Smith, S. C. (2017). Economic Development. *Routledge Handbook of Marxian Economics*. <https://doi.org/10.4324/9781315774206-29>
- UNDP. (2004). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Retrieved from <https://www.newsindo.com/beasiswa/undp1.pdf>
- Villar, A. (2023). Welfare Poverty Measurement. *Journal of Human Development and Capabilities*, 24(2), 147–162. <https://doi.org/10.1080/19452829.2023.2199974>
- Warsono, H., Gunarto, & Suyanto, B. (2019). *Kajian Kebijakan Sosial* (Vol. 2).
- Wajdi, N., Mulder, C. H., & Adioetomo, S. M. (2017). Inter-regional migration in Indonesia: a micro approach. *Journal of Population Research*, 34(3), 253–277. <https://doi.org/10.1007/s12546-017-9191-6>
- Yusuf, D., & Freytag-Leyer, B. (2020). Causes and effects of woman rural-urban migration – field study amongst female street food vendors in Tangerang-Indonesia

and Hat Yai. 21st International Scientific Conference “Economic Science for Rural Development 2020”. Home Economics, Marketing and Sustainable Consumption, Integrated and Sustainable Regional Development, New Dimensions in the Development of Society., 54(54), 13–20. <https://doi.org/10.22616/esrd.2020.54.001>
 Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

TABEL

Tabel 1. Ringkasan Statistik

	Obs.	Mean	St. Dev.	Min.	Max.
<i>Kemiskinan</i>	38	110.03	67.84	7.88	252.88
<i>RLS</i>	38	8.27	1.62	5.06	11.67
<i>PDRB</i>	38	66231.32	85836.81	22225.65	522857.06
<i>Dummy</i>	38	0.76	0.43	0.00	1.00

Tabel 2. Ringkasan Uji Asumsi Klasik

	Nilai
Prob. z (Uji Jarque-Bera)	0.0729
Prob. Chi2 (Uji White)	0.1667
<i>VIF</i>	
Pendidikan	2.29
Tipe Pemerintahan	2.01
PDRB	1.72

Tabel 3. Hasil Estimasi Regresi

VARIABLES	(1) Y = LnKemiskinan
Constant	0.992 (1.734)
LnPendidikan	-1.811*** (0.600)
LnPDRB	0.532*** (0.151)
TipePemerintahan	1.871*** (0.259)
Observations	38
Prob. F	0.000
R-squared	0.797
Standard errors in parentheses	
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1	